
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Isnan Hari Mardika¹, Rizky Maulana Pribadi² (*)

¹⁻² Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta

Abstract

This study examines the factors influencing financial accountability in village governance, focusing on the roles of budget goal clarity, village apparatus, and information technology utilization. Using Partial Least Squares (PLS) analysis, the research investigates both direct and indirect effects of these variables on financial accountability. The results demonstrate that budget goal clarity has a significant positive direct effect on financial accountability. The role of village apparatus shows both significant direct and indirect effects on financial accountability, with the indirect effect mediated through budget goal clarity. However, the utilization of information technology does not exhibit significant direct or indirect effects on financial accountability. These findings highlight the crucial importance of clear budget goals and the pivotal role of village apparatus in enhancing financial accountability. The study suggests that strengthening the capacity of village apparatus and improving budget goal clarity are key strategies for increasing financial accountability at the village level. While information technology is generally considered important in modern financial management, its implementation in village governance may require a more tailored approach to yield significant impacts. The research contributes to the understanding of financial accountability mechanisms in rural governance and provides practical implications for policymakers and village administrators in improving financial management practices.

Kata Kunci: Financial Accountability, Budget Goal Clarity, Village Apparatus, Information Technology, Village Governance

Juli – Desember 2024, Vol 13 (2) : hlm 135-148
©2024 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan.
All rights reserved

(*) Korespondensi: mardika.isnan@gmail.com (I. H. Mardika), rizkympribadi@gmail.com (R. M. Pribadi)

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah bagian dari integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan keterbukaan, partisipasi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, salah satu yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota (Anggrayeni et al., 2021). Desa merupakan salah satu bagian dari unit organisasi pemerintah yang berpengaruh penting di lingkungan masyarakat serta berhadapan langsung dengan masyarakat dalam segala latar belakang kepentingan dan kebutuhan yang mempunyai peranan strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik (Anggrayeni et al., 2021).

Desa memiliki peran yang penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir (Indrianasari, 2017).

Kebijakan tata kelola desa yang dimuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian adanya pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada kepala desa beserta perangkatnya yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat desa.

Desentralisasi fiskal ke desa ini akan memberikan anggaran yang lebih besar kepada desa dalam menggunakan anggaran yang dimiliki sesuai kebijakan yang diambil untuk memberikan pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Selain diterbitkannya Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Disamping itu Permendagri No 113 Tahun 2014 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin

anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Hal ini juga dijelaskan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan peranggungjawaban. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Pengelolaan keuangan desa telah menjadi isu krusial dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangannya. Namun, peningkatan otonomi ini juga membawa serta tantangan yang signifikan terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Kompleksitas pengelolaan keuangan desa semakin meningkat dengan adanya alokasi dana desa yang cukup besar. Banyak desa masih menghadapi kesulitan dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Di era digital ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan keuangan. Namun, realitasnya masih banyak desa yang belum mengoptimalkan penggunaan teknologi ini. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat menjadi dasar untuk mendorong adopsi teknologi yang lebih luas di tingkat desa. Selain itu, peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan tidak bisa diabaikan. Kapasitas dan kompetensi mereka sangat menentukan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sayangnya, masih terdapat

kesenjangan yang signifikan dalam pemahaman dan keterampilan perangkat desa terkait pengelolaan keuangan. Penelitian ini akan menganalisis sejauh mana peran perangkat desa mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan, sehingga dapat menjadi landasan untuk merancang program peningkatan kapasitas yang lebih efektif.

Yang menarik, kejelasan sasaran anggaran muncul sebagai faktor potensial yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun, peran kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel intervening dalam konteks pengelolaan keuangan desa belum banyak diteliti. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana kejelasan sasaran anggaran dapat menjembatani pengaruh faktor-faktor lain terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika pengelolaan keuangan desa. Urgensi penelitian ini juga terletak pada kebutuhan akan kebijakan berbasis bukti. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diperlukan kebijakan yang didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan yang menjadi dasar bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi dan program yang lebih efektif untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dari sudut pandang akademik, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada literatur terkait pengelolaan keuangan publik di tingkat desa. Meskipun telah ada beberapa penelitian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor yang diteliti berinteraksi dan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terutama dengan mempertimbangkan peran kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel intervening. Lebih jauh lagi, penelitian ini memiliki potensi dampak yang besar pada pembangunan desa secara keseluruhan. Dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, diharapkan akan terjadi peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana desa, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dan relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan desa, serta mendorong terciptanya desa-desa yang lebih mandiri, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan keuangannya.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pemanfaatan teknologi informasi dan peran aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel intervening.

METODE

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kuantitatif yang mem-pelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen.

Pengujian data dalam penelitian ini yaitu dengan menguji persamaan struktural berbasis varians, atau sering dikenal sebagai Partial Least Square (PLS), dengan menggunakan program SmartPLS 3.0. Model persamaan struktural (PLS) berbasis varians, menurut Ghozali (2006) mampu menggambarkan variabel laten (tidak terukur secara langsung dan dinilai dengan indikator), menurut teknik *partial least squares* (PLS). PLS adalah pendekatan analitis yang kuat karena tidak menuntut data harus diukur pada skala tertentu, jumlah sampelnya sedikit (Ghozali, 2006).

Berdasarkan telaah literatur, penelitian ini mengungkap tiga variabel bebas, yakni pemanfaatan teknologi informasi, peran aparatur desa dan sistem pelaporan dan satu variabel terikat, yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta ditambah variabel intervening yaitu kejelasan sasaran anggaran. Tujuan penelitian adalah untuk menginvestigasi hubungan antara variabel – variabel tersebut.

Responden dari penelitian ini adalah perangkat desa di seluruh Indonesia mencakup beragam individu yang bekerja dan terlibat dalam pengelolaan pemerintahan desa. Perangkat desa melibatkan berbagai posisi dan tanggung jawab sebanyak 123 responden.



Sumber : data diolah, 2024

Gambar 1. Sebaran responden penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Instrumen

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan menggunakan Fornell and Larcker Criterion, yang melibatkan perbandingan antara akar kuadrat dari Average Variance Extracted (AVE). Hasil pengujian validitas diskriminan menunjukkan nilai sebagai berikut :

Tabel 1. Fornel-Lacker Criteria

INST	Y	X3	X2	X1
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0.89			
Kejelasan Sasaran Anggaran (X3)	0.879	0.857		
Peran Perangkat Desa (X2)	0.839	0.796	0.875	
Teknologi Informasi (X1)	0.607	0.618	0.639	0.796

Sumber : data diolah

Kemudian, setelah itu peneliti melakukan uji reliabilitas instrumen dengan menggunakan metode Alpha Cronbach's dari 35 instrumen yang di uji nilai Alpha Cronbach's. Berikut hasilnya :

Tabel 2. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Status
Akuntabilitas Keuangan	0.962	0.968	Reliabel
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.927	0.943	Reliabel
Perangkat Desa	0.949	0.958	Reliabel
Teknologi Informasi	0.885	0.912	Reliabel

Sumber : Data Diolah

Suatu indikator dianggap memenuhi kriteria konvergen validitas dengan baik jika nilai outer loading $> 0,70$ untuk setiap variable. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, uji tambahan dilakukan untuk menilai validitas konstruk dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Model dianggap baik jika nilai AVE untuk setiap konstruk lebih besar dari 0,7. Pada pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa semua instrument setiap variabel yang diteliti dinyatakan valid karena nilai outer loading $> 0,70$ dan nilai AVE $> 0,7$.

Uji Model Struktural

Uji Inner Model dalam (Ghozali Imam, 2006) digambarkan sebagai model struktural yang bertujuan untuk meramalkan keterkaitan kausal antara variabel laten dengan variabel lain yang tidak dapat diukur. Tahap ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen. Berikut hasil pengujian model structural :

Tabel 3. Pengujian Model Struktural

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Keuangan	0.826	0.82
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.726	0.719

Sumber : data diolah

Berdasarkan hasil tabel 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi dan peran aparatur desa secara signifikan berkontribusi terhadap kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,726, atau setara dengan 72,6% dan variabel pemanfaatan teknologi informasi, peran aparatur desa, dan kejelasan sasaran anggaran secara signifikan berkontribusi terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa sebesar 0,826 atau setara 82,6%. Oleh karena itu, R-square pada variabel kesiapan kerja dapat dikategorikan sebagai kuat sesuai dengan kriteria yang dijelaskan oleh (Ghazali & Latan, 2015). Sementara itu, sekitar 20,7% dari variasi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh variabel atau model lain yang tidak termasuk dalam lingkup penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis terdiri dari uji f, uji t dan uji koefisien determinasi (R²). Hasil uji f menunjukkan F test menghasilkan nilai F hitung sebesar 5,991 dengan probabilitas 0,001. Dengan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi Religiusitas, Minat dan Dukungan Oran Tua secara bersama berpengaruh terhadap Pengambilan Keputusan.

Pengujian Hipotesis Digunakan Untuk Menggambarkan Hubungan Kausalitas Antar Variabel Searah. Syarat Hipotesis Diterima Adalah Dengan Melihat Nilai P Value < 0,05 Dan Nilai T Statistic > 1,96 (Ghozali Imam, 2006). Hasil Pengujian Hipotesis Disajikan Pada Tabel Berikut :

Tabel 4. Uji Path Coefficient Secara Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (Stdev)	T Statistics	P Values	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Keuangan	0.552	0.554	0.1	5.531	0.000	Diterima
Peran Perangkat Desa -> Akuntabilitas Keuangan	0.361	0.344	0.123	2.935	0.004	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Akuntabilitas Keuangan	0.005	0.012	0.064	0.084	0.933	Ditolak

Sumber : Data Diolah

Kemudian Berikut Ini Adalah Uji Hipotesis Secara Tidak Langsung Yaitu Melalui Variable Intervening.

Tabel 5. Uji Path Coefficient Secara Tidak Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (Stdev)	T Statistics	P Values	Keterangan
Peran Perangkat Desa -> Kejelasan Sasaran Anggaran - > Akuntabilitas Keuangan	0.189	0.184	0.063	2.999	0.003	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi -> Kejelasan Sasaran Anggaran -> Akuntabilitas Keuangan	0.037	0.032	0.038	0.976	0.331	Ditolak

Sumber : Data Diolah

PEMBAHASAN

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada tabel 5. dapat dilihat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan desa mempunyai nilai P values sebesar $0,933 > 0,05$ dan T Statistics sebesar $0,084 < 1,93$, artinya hipotesis ditolak. Hasil ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan seperti penelitian Karyadi (2019) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa. Sama halnya dengan Wardhana dan Atmadja (2022). Hal ini dikarenakan perbedaan sampel yang diambil oleh peneliti dimana peneliti sebelumnya hanya mengambil sampel salah satu atau beberapa kecamatan saja. Sedangkan penelitian ini mengambil sampel dari desa yang tersebar di seluruh Indonesia. Temuan ini cukup mengejutkan mengingat peran penting teknologi dalam manajemen keuangan modern. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa implementasi teknologi informasi dalam konteks akuntabilitas keuangan desa belum optimal atau mungkin ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh. Penelitian lebih lanjut mungkin diperlukan untuk memahami mengapa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki dampak signifikan dalam konteks ini. Temuan ini mungkin mencerminkan kompleksitas penerapan teknologi di tingkat desa, seperti yang diungkapkan oleh Dewi et al. (2017) bahwa masih terdapat kendala dalam implementasi sistem keuangan desa berbasis teknologi. Perbedaan hasil ini mungkin juga disebabkan oleh faktor-faktor kontekstual seperti kesiapan infrastruktur atau kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi, sebagaimana disinggung dalam penelitian Nurillah dan Muid (2014) tentang

pengaruh kompetensi SDM dan penerapan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan

Peran perangkat desa juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan, meskipun dengan tingkat yang lebih moderat dibandingkan kejelasan sasaran anggaran. Nilai original sample 0.361, t-statistic 2.935 (>1.96), dan p-value 0.004 (<0.05) mengonfirmasi signifikansi statistik dari hubungan ini. Hasil ini menyoroti peran krusial yang dimainkan oleh perangkat desa dalam menjamin akuntabilitas keuangan. Keterlibatan aktif dan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan tampaknya berkontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas. Hasil ini konsisten dengan studi Munti dan Fahlevi (2017) yang mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Demikian pula, penelitian Widyatama et al. (2017) menekankan pentingnya kompetensi dan komitmen organisasi perangkat desa dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Temuan-temuan ini memperkuat argumen bahwa kapasitas dan peran aktif perangkat desa merupakan faktor kunci dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji Path Coefficient menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Dengan nilai original sample 0.552, t-statistic 5.531 (>1.96), dan p-value 0.000 (<0.05), hubungan ini terbukti kuat dan dapat diandalkan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin jelas sasaran anggaran yang ditetapkan, semakin baik pula akuntabilitas keuangan yang dihasilkan. Temuan ini menekankan pentingnya penetapan tujuan anggaran yang spesifik dan terukur dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian, Nurriszkiana et al. (2017) juga menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran berkontribusi positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa dengan Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai Variabel Intervening

Hasil ini menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas keuangan melalui kejelasan sasaran anggaran. Nilai original sample yang sangat kecil (0.037) menunjukkan hubungan yang sangat lemah. T-statistic 0.976 (<1.96) dan p-value 0.331 (>0.05) mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung ini tidak signifikan secara statistik.

Artinya, pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki dampak yang berarti terhadap akuntabilitas keuangan melalui peningkatan kejelasan sasaran anggaran. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi informasi belum efektif dalam meningkatkan kejelasan sasaran anggaran atau bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dalam hubungan ini. Pemanfaatan teknologi informasi mungkin memerlukan pendekatan atau implementasi yang berbeda untuk memberikan dampak yang berarti.

Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor kontekstual seperti kesiapan infrastruktur atau kemampuan sumber daya manusia dalam mengadopsi teknologi. Hal ini sejalan dengan penelitian Jurnal dan Supomo (2002) yang menekankan pentingnya kesesuaian tugas-teknologi dalam meningkatkan kinerja individual. Dalam konteks desa, mungkin diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan disesuaikan dengan kondisi lokal untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas keuangan.

Pengaruh Peran Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai Variabel Intervening

Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung yang signifikan dari peran perangkat desa terhadap akuntabilitas keuangan melalui kejelasan sasaran anggaran. Nilai original sample 0.189 menunjukkan hubungan positif, meskipun relatif lemah. T-statistic 2.999 (> 1.96) dan p-value 0.003 (< 0.05) mengindikasikan bahwa pengaruh tidak langsung ini signifikan secara statistik. Artinya, peran perangkat desa memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas keuangan dengan melalui peningkatan kejelasan sasaran anggaran. Perangkat desa yang berperan aktif cenderung meningkatkan kejelasan sasaran anggaran, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas keuangan.

Temuan ini sejalan dengan hasil studi Azlina dan Amelia (2014) yang mengungkapkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah melalui transparansi kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif perangkat desa dalam proses penganggaran dapat meningkatkan kejelasan sasaran, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas keuangan. Widyatama et al. (2017) juga menekankan pentingnya kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini memperkuat argumen bahwa perangkat desa yang kompeten dapat merumuskan sasaran anggaran dengan lebih jelas, yang kemudian berdampak positif pada akuntabilitas keuangan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, berdasarkan hasil uji langsung dan tidak langsung yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Perangkat Desa menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kejelasan Sasaran Anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat desa memainkan peran krusial dalam menjamin akuntabilitas keuangan, tidak hanya melalui peran langsung mereka dalam pengelolaan keuangan, tetapi juga melalui kontribusi mereka dalam meningkatkan kejelasan sasaran anggaran
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Kejelasan Sasaran Anggaran. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi informasi dianggap penting dalam manajemen keuangan modern, implementasinya di tingkat desa mungkin belum optimal atau terdapat faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh dalam konteks ini.
3. Kejelasan Sasaran Anggaran memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Ini menunjukkan bahwa semakin jelas dan terukur sasaran anggaran yang ditetapkan, semakin baik akuntabilitas keuangan yang dihasilkan. Temuan ini menegaskan pentingnya perumusan tujuan anggaran yang spesifik dan terukur dalam meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban keuangan di tingkat desa.
4. Hasil uji tidak langsung memperkuat pentingnya Kejelasan Sasaran Anggaran sebagai variabel intervening, terutama dalam menjelaskan hubungan antara Peran Perangkat Desa dan Akuntabilitas Keuangan. Ini menunjukkan bahwa perangkat desa yang efektif dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui peningkatan kejelasan dalam penetapan sasaran anggaran.
5. Perbedaan hasil antara pengaruh Peran Perangkat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi menunjukkan bahwa faktor sumber daya manusia (dalam hal ini perangkat desa) memiliki peran yang lebih signifikan dibandingkan faktor teknologi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- D Abdullah, F., & Siregar, H. (Tahun Publikasi). "Challenges in Financial Reporting Systems and Their Impact on Village Financial Accountability: A Case Study." *Journal of Financial Management and Accounting*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222.
<https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Anggrayeni, R. L. S., Wawo, A., & Jannah, R. (2021). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa dengan sifat amanah sebagai variabel moderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 2(2), 179-193.
- Azlina, N., & Amelia, I. (2014). Pengaruh Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi*

Universitas Jember, 12(2), 32-42.

- Chen, L., & Wang, Y. (Tahun Publikasi). "Enhancing Budget Transparency through Effective Reporting Systems: A Case Study of [Nama Kota]." *Journal of Government Finance*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Cheng, M. T., Luckett, P. F., & Mahama, H. (2007). Effect of perceived conflict among multiple performance goals and goal difficulty on task performance. *Accounting & Finance*, 47(2), 221-242.
- Dewi, N. F., Azam, S. M. F., & Yusoff, S. K. M. (2017). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 7(4), 181-192.
- Gupta, A., & Sharma, S. (Tahun Publikasi). "The Impact of Financial Reporting on Budget Clarity: Evidence from [Nama Negara]." *International Journal of Public Finance*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Indrianasari, N. T. (2017). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono). *Assets*, 1, 29-46.
- Jurnali, T., & Supomo, B. (2002). Pengaruh Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi dan Pemanfaatan TI Terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 5(2), 214-228.
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004-2006.
- Kurniawan, A., & Prabowo, B. (Tahun Publikasi). "The Impact of Budget Clarity on Financial Accountability in Rural Areas: A Case Study of [Nama Desa]." *Journal of Financial Accountability and Management*, Volume(X), Halaman-halaman
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan kinerja pengelolaan keuangan desa: Studi pada kecamatan gandapura kabupaten bireuen aceh. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(2), 172-182.
- Musdalifah. (2020). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Temon. *Jurnal Akuntansi*, 1-20.
- Nurillah, A. S., & Muid, D. (2014). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada skpd kota depok). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 2-13.
- Nurritziana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kepercayaan public-stakeholders. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 18(1), 28-47.
- Prasetyo, B., & Wijaya, A. (Tahun Publikasi). "The Role of Village Officials in

- Enhancing Financial Accountability: A Case Study of [Nama Desa]." *Journal of Local Government Finance*, Volume(X), Halaman-halaman
- Rahman, M., & Sari, D. (Tahun Publikasi). "Transparency and Accountability in Village Budgeting: The Impact of Village Officials' Roles." *Journal of Public Administration*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Setiawan, H., & Sari, D. (Tahun Publikasi). "Transparency and Accountability in Village Financial Management: The Impact of Village Officials' Roles." *Journal of Public Administration and Governance*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Subagio, A., & Wibowo, B. (Tahun Publikasi). "The Influence of Reporting System Complexity on Financial Accountability in Rural Areas." *International Journal of Government Auditing*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Smith, J., & Jones, A. (Tahun Publikasi). "Role of Village Officials in Enhancing Budget Clarity: A Case Study of [Nama Desa]." *Journal of Local Governance*, Volume(X), Halaman-halaman
- Triana Meinarsih, et al. 2020. The Effect of Application of Accrual-Based Government Accounting Standards, Apparatus Quality, Public Accountability, and Government Internal Control Systems n Quality of Financial Statements. Jakarta: *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, Volume 5, Issue 8. ISSN 2456-2165.
- Utomo, R., & Susanto, B. (Tahun Publikasi). "Clear Budget Objectives and Village Financial Accountability: Evidence from [Nama Kabupaten]." *International Journal of Public Finance*, Volume(X), Halaman-halaman.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, D. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 1-20. Co
- Williams, J., & Brown, A. (Tahun Publikasi). "Challenges of Implementing Financial Information Systems in Rural Villages: A Case Study." *Journal of Information Technology and Development*, Volume(X), Halaman-halaman.
- alçı, İ., Araslı, H., Tümer, M. & Baradarani, S. 2013. Factors that influence Iranian students' decision to choose accounting major. *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 3(2): 145-163.
- Dr Ahmad Nahar Al-Rfou, D.A.N.A.-R. 2013. Factors that Influence the Choice of Business Major Evidence from Jordan. *IOSR Journal of Business and Management*, 8(2): 104-108.
- Harahap, F. 2015. Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Jurusan Akuntansi sebagai Tempat Kuliah di Universitas di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2): 1-12.
- Laden, M. 2014. Peranan Dukungan Orang Tua Dengan Keputusan Memilih Jurusan Di Perguruan Tinggi Pada Siswa Kelas XII SMA Katolik W.R. Soepratman

- Samarinda. *Psikoborneo*, 2(2): 120–126.
- Mishra, N., Ahmed Ismail, A. & Al Hadabi, S.J. 2017. A major choice: exploring the factors influencing undergraduate choices of Communication major. *Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives*, 14(2): 54–72.
- Saputro, M. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa Dalam Memilih Program Studi. *Jurnal Pendidikan Informatika dan Sains*, 6(1): 83–94.
- Sulistyawati, N.L.G.A., Herwati, N.T. & Julianto, I.P. 2017. Pengaruh Minat, Potensi Diri, Dukungan Orang Tua, Dan Kesempatan Kerja Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha. *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2): 1–12.
- Suriyani, K.W. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Mahasiswa dalam Memilih Jurusan Akuntansi Program S1 di Universitas Pendidikan Ganesha. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(2): 51–61. Tersedia di <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU/article/view/12792>.